



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2026





DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) 2026 adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, September 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam



Dr. H. Gustian Riau, SE.M.Si

NIP. 19690830 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen.....	2
Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN..... LALU7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	21
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	21
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	23
2.3.3 Peluang dan Tantangan.....	24
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah....	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37

3.3	Program dan Kegiatan	37
-----	----------------------------	----

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..51

BAB V PENUTUP	58
----------------------------	-----------

5.1	Catatan Penting	59
5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	60
5.3	Rencana Tindak Lanjut	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025 Kota Batam.....	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.....	20
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam.....	25
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam.....	36
Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026.....	38
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027.....	41
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Perindustrian dan Perdagangan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



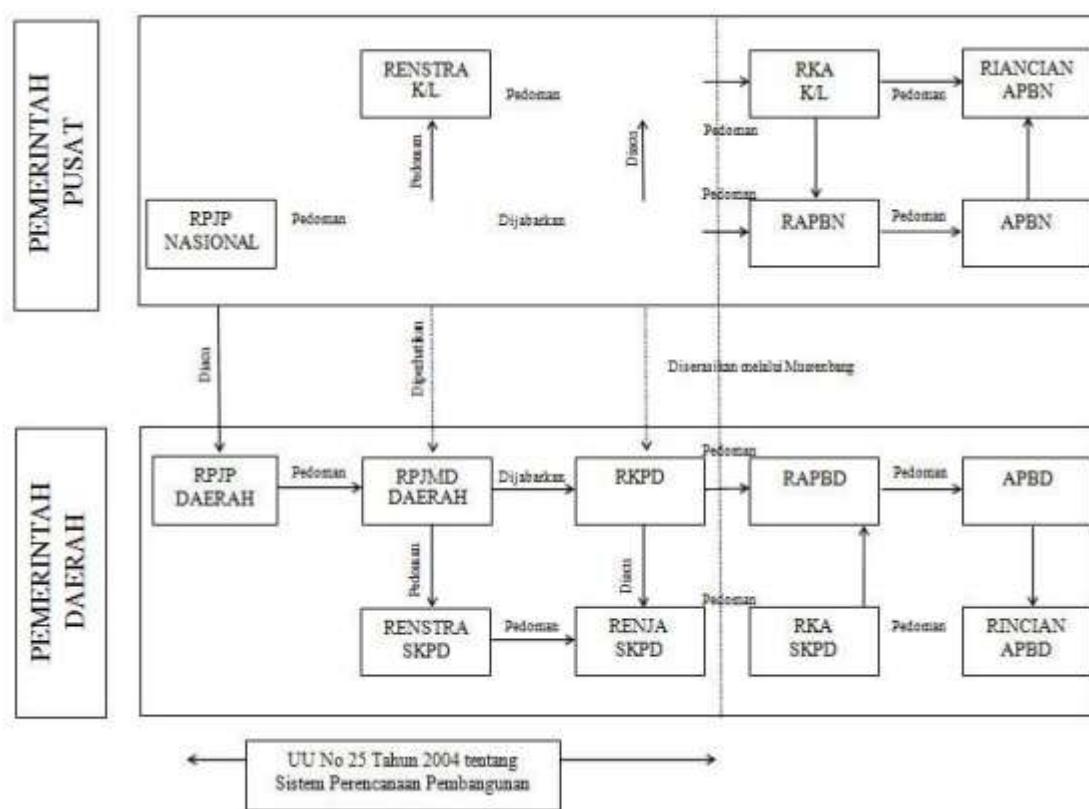
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus

disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, *terakhir dengan Undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru*);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); *bagi Perangkat Daerah yang memiliki SPM*

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 39);
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun (n).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun (n)

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan urusan Perdagangan, dari target fisik yaitu 0% mencapai 0%
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan urusan Perdagangan, dari target fisik yaitu 40.76% mencapai 27.60%
 - c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen urusan Perdagangan, dari target fisik yaitu 45.96% mencapai 26.89%
 - d. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri urusan Perdagangan, dari target fisik yaitu 33.88% mencapai 19.20%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pengembangan Ekspor urusan Perdagangan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 93.90%
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota urusan Perdagangan, dari target fisik yaitu 78.80% mencapai 60.68%
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting urusan Perdagangan, dari target fisik yaitu 1.47% mencapai 1.21%

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah Program-program tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada semester II.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah belum dapat diukur sampai dengan akhir semester II tahun Anggaran 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan/tahun 2025)**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s/d Juli 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	
30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	
30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	56	74	106%	56 Orang	56 Orang	100 %
30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s/d Juli 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100 %
30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %
30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	-	-	-	4 Paket	4 Paket	100 %
30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100 %
30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	05 Laporan	2 Laporan	² Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100 %
30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)			
30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	18	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100 %
30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18	-	-	-	11 Unit	11 Unit	100 %
30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		
				Dinas Operasional atau Lapangan								
30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	30	3 Unit	3 Unit	100 %	72 Unit	72 Unit
30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit
30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Percentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	50%
30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	-	-	-	-	-	-
30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2 Laporan	-	-	-	-	-	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)			
30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Percentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	7000 Dokumen		7000 Dokumen	7000 Dokumen	100%	9000 Dokumen	4500 Dokumen	50 %
30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	37.74 %	30,19	37.74 %	37.74 %	100%	43,40%	43,40%	100 %
30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100 %
30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	60%	70 %	70 %	100%	75%	25%	50 %
30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Percentase Jumlah barang dan harga yang disurvei	100%	100%	100%	100%	100%	100 Persen	50 Persen	50 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)			
30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52 Laporan	-	-	-	-	-	-	
30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	² Laporan	100%	2 Laporan	-	
30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	16.50 Persen	-	-	-	-	-	-	
30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	-	-	-	-	-	-	
30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	-	-	-	-	-	-	
30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta \$)	716 (Juta \$)	950 (juta \$)	950 (juta \$)	100%	975 (juta \$)	450 (juta \$)	50 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)			
30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	50.00 Persen	33,33 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	100%	66,67%	66.76 %	100 %
30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	100%	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100 %
30	05	2.01		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	-	-	-	-			100 %
30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	4,91%	5.67 %	5.67 %	100%	5,85%	5,85%	100 %
30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90,00%	104,91%	90,00%	90,00%	100%	92,00%	92,00%	100 %
30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	100 Pelaku Usaha	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100 %
30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	-	-	-	-	-			100 %

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (s/d Juli 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	9,44%	8.80 %	8.80 %	9,01%	9,01%
31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	55,00%	70,16	55,00%	55,00%	100%	60,00%
31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen
31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen
31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)			
31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
				UPTD METROLOGI LEGAL									
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	4,91%	5,67%	5,67%	100%	5,85%	5,85%	100 %
30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90,00%	104,91%	90,00%	90,00%	100%	92,00%	92,00%	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		
30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8900	16330	8900 5.755,00	65%	10000Unit 5000 Unit	5000 Unit	50 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kunci Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Satuan	Catatan Analisis
				Tahun n ⁻² (2024)	Tahun n ⁻¹ Tahun 2025	Tahun 2026 tahun n	Tahun n ¹ 2027	Tahun n ⁻² (2024)	Tahun n ⁻¹ 2025	Tahun n 2026	Tahun n ¹ 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan			3,50%	4,10%	4.50	-	3,54	4,10%	4.50	-	Persen	Renstra 2021-2026
2	Pertumbuhan jumlah IKM			8,80	9,00	10.00	-	9,34	9.00	10.00	-	Persen	Renstra 2021-2026
3	Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp / Orang)			68,00	70,00	70.50	-	68,05	70.00	70.50	-	Persen	Renstra 2021-2026
4	Pertumbuhan produksi IKM			5,00	6,00	7.00	-	5,01	6.00	7.00	-	Persen	Renstra 2021-2026
5	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok			<5%	<5%	<5%	-	<5%	<5%	<5%	-	Persen	Renstra 2021-2026
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota				41,20%	41,40%				41,20%	41,60%	Persen	Renstra 2025-2029
7	Persentase Pertumbuhan sub sektor perdagangan PDRB (ADHK)				9,05%	9,10%				9,05%	9,15%	Persen	Renstra 2025-2029
8	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan				92,77	92,82				92,77	92,85	Indeks	Renstra 2025-2029

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- **Kekuatan (Strengths)**

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

- **Kelemahan (weaknesses)**
 1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
 2. Rendahnya kemampuan professional aparatur dibidang Industri dan Perdagangan
 3. Tidak meratanya beban kerja
 4. Masih lemahnya pelaksanaan system monitoring dan pengendalian
 5. Belum efektifnya pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi
 6. Pejabat structural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Batam adalah sebagai berikut :

- *Sektor Perindustrian*
 - Kurang berkembangnya Industri Hilir
 - Belum optimalnya pola kemitraan antara produsen/pemasok bahan baku dengan pengusaha industri hilir
 - Kurang berkembangnya industri sekunder dan pusat pertumbuhan Agroindustri dan Agrokimia.
 - Belum optimalnya industri logam untuk mendukung pembuatan mesin/peralatan pabrik yang menunjang Agroindustri terutama Agroindustri kecil dan rumah tangga.
 - Belum berkembangnya industri barang modal yang mendukung pengembangan sarana prasarana produksi dan distribusi.
 - Belum berkembangnya industri penunjang, khususnya industri komponen untuk tujuan ekspor serta perusahaan-perusahaan rekayasa.
 - Masih rendahnya produktifitas industri terutama industri dalam negeri yang menghasilkan produk bernilai tambah.
- *Sektor Perdagangan Dalam Negeri*
 - Belum berkembangnya sistem perdagangan barang dan jasa yang terintegrasi dengan perdagangan lokal, regional dan global.
 - Belum mantapnya sistem dan mekanisme distribusi barang, terutama kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

- Masih Tingginya ketergantungan terhadap daerah produsen dan produk impor untuk memenuhi kebutuhan sembako di Kota Batam.
- Produk import yang belum dapat memenuhi kebutuhan kota Batam dan menekan harga di pasar.
- Masih terbatasnya peralatan pendukung kemetrologian dalam rangka tera ulang UTTP.
- *Sektor Perdagangan Luar Negeri*
- Rendahnya daya saing produk ekspor yang berbasis sumberdaya lokal
- Terbatasnya informasi dan promosi produk ekspor.
- Belum optimalnya kerjasama ekonomi sub regional dan perdagangan lintas batas

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam terdapat beberapa tantangan dan Peluang yang harus dihadapi yaitu:

- **Tantangan (threat)-**

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang baik
3. Adanya Badan Pengelolaan Pulau Batam
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perdagangan dan perindustrian yang berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi industry dan perdagangan yang belum tergarap secara maksimal

- **Peluang (Opportunity)**

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan *stakeholder* lainnya

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah :

1. Struktur Industri yang tidak seimbang, dimana industri yang berkembang adalah Industri yang bersifat Footloose Industry dan minim keterkaitan dengan Sumber Daya Lokal.
2. Terbatasnya daya dukung Industri Kecil dan Menengah, karena industri yang berkembang bukan dengan Pola Industri Satelit atau saling terkait.
3. Belum tersedianya Infrastruktur Pendukung Pengembangan dan Penelitian Industri. Kawasan Industri Kecil khususnya industri yang berbasis Sumber Daya Kelautan (Maritime) Batam potensial dikembangkan Industri berbasis Maritim mengingat Batam merupakan Daerah Kepulauan.
4. Terbatasnya Fasilitasi Ekspor bagi IKM.
5. Belum berkembangnya Industri Rumah Tangga di daerah Hinterland, sehingga barang hasil industri tersebut belum memenuhi mutu untuk dieksport.
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana di dalam meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan.
7. Peraturan dibidang eksport dan import yang belum jelas pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bekas Batam Bintan Karimun

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Batam

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	6	7	8	9	11
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			31.777.970.981	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			26.199.932.628,73
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			28.927.970.981	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			22.822.849.578,73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%	16.914.376.476	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Disperindag Nilai Sakip Disperindag	92,82 Angka 73,73 Angka	18.139.632.875,73
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	10.964.800,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.373.400,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.591.400,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	15.587.498.019	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	15.593.578.018,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	15.492.498.019	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	15.492.498.018,85
				95.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	101.080.000,00

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	350.762.645	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	408.174.200,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.496.880	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.803.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	126.765.060	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	144.178.100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.013.705	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.928.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.038.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.881.600,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	180.187.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	188.344.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	158.015.812	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	810.343.000,00
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	54.697.781	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	143.347.000,00

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	103.318.031	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	182.901.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	560.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	946.432.856,88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	560.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	946.432.856,88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	258.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	370.140.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.880.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	168.960.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	279.910.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	49.360.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	50.350.000,00
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Percentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100%	100.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Percentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 Persen	53.636.000,00

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	50.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Fasilitasi Izin TDG yang diterbitkan	100	21.654.000,00
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	21.654.000,00
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	50.000.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100 Persen	10.328.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	9500 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8700 Dokumen	10.328.000,00
					Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Izin Usaha Perdagangan Mikol yang difasilitasi	100 Persen	21.654.000,00
					Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	21.654.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	50,94	1.200.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya	21.15 Persen	642.138.898,00

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	100%	1.000.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi	30.00 Persen	499.955.898,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	1.000.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	499.955.898,00
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan	2 Pembinaan	200.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengelola Pasar yang dilakukan Pembinaan	17.78 Persen	142.183.000,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	142.183.000,00
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	100.000.000				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	100%	9.058.594.505	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	76.67 Persen	3.445.383.305,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	100%	8.958.594.505	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	83,33 Persen	3.445.383.305,00

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52 Laporan	250.000.000				
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	8.708.594.505	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	3.445.383.305,00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	17,50%	100.000.000				
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadapupuk dan pestisida bersubsidi	6 Laporan	50.000.000				
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	50.000.000				
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	1000 (juta\$)	505.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	1100 USD (Juta)	310.240.200,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	100,00%	505.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha berorientasi ekspor yang di Promosikan	100 Persen	310.240.200,00
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam	10 Pelaku Usaha	355.000.000				

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pameran Dagang Nasional							
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	150.000.000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	310.240.200,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5,99%	150.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	91.00 Persen	151.743.900,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95%	150.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI	91.00 Persen	151.743.900,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	100 Orang	100.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	151.743.900,00
	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit hasil penyidikan metrologi legal	2 Unit	50.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	4,76 Persen	80.074.400,00
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Promosi dan Pemasaran	100 Persen	80.074.400,00
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	80.074.400,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.850.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.377.083.050,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9,01%	2.850.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	58,00 Persen	3.327.083.050,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	60,00%	2.850.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja IKM	65.00 Persen	3.327.083.050,00

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Kebutuhan Dana
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	500.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	2.627.083.050,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.850.000.000	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	50.000.000,00
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	40.00 Persen	50.000.000,00
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri dalam Pelaporan pada SIINas	40,00 Persen	50.000.000,00

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana
					Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas	1 Dokumen	50.000.000,00
	UPTD METROLOGI LEGAL			1.000.000.000	UPTD METROLOGI LEGAL			496.234.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.000.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			496.234.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.000.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			496.234.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5,99%	1.000.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	91,00 Persen	496.234.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95%	1.000.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera, Tera Ulang	100,00 Persen	496.234.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	23000	1.000.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000 Unit	496.234.000,00

Terdapat perbedaan pada rancangan awal dengan hasil Analisa kebutuhan disebabkan adanya perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Tahun 2025-2029 serta Renstra Tahun 2021-2026 menjadi Renstra Tahun 2025-2029.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kecamatan Bengkong	Jumlah Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150 Orang	Pelatihan Rajut Pemula
		Kecamatan Batam Kota		20 Orang	Pelatihan Batik Pemula

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang pertama yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah :

"Meningkatkan pertumbuhan subsektor perindustrian dan perdagangan"

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perekonomian sektor Industri Kecil Menengah
2. Meningkatnya Daya Saing sektor Perdagangan
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas pelayanan Pemerintahan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
Tahun 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan subsektor perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya Perekonomian sektor Industri Kecil Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	39.38%
		Meningkatnya Daya Saing sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan sub sektor perdagangan PDRB (ADHK)	9.97%
		Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92.82

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025-2029*. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi 1 Kota Batam Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengusulkan 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 26.199.932.628.73,00. Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- a) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- b) Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- c) Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- a) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- a) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal

6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- a) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- a) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- a) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027
Kota Batam

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				26.199.932.628,73				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				22.822.849.578,73				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Disperindag Nilai Sakip Disperindag		92,82 Angka 73,73 Angka	18.139.632.875,73			92,82 Angka 73,73 Angka	92,85 Angka 74,73 Angka
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persen	10.964.800,00			100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	4 Dokumen	9.373.400,00	APBD		4	16.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	2 Laporan	1.591.400,00	APBD		2	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persen	15.593.578.018,85			100%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	98 Orang/bulan	15.492.498.018,85	APBD		98 Orang/Bulan	17.478.245.445
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	1 Dokumen	101.080.000,00	APBD		12	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 Persen	408.174.200,00			100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Batam	1 Paket	24.803.500,00	APBD		1	24.815.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	1 Paket	144.178.100,00	APBD		3	126.765.060
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	1 Paket	20.928.600,00	APBD		3	21.013.705
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Batam	1 Paket	22.038.400,00	APBD		2	22.100.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Batam	2 Dokumen	7.881.600,00	APBD		2	7.200.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	12 Laporan	188.344.000,00	APBD		12	200.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persen	810.343.000,00			100%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Batam	1 Unit	484.095.000,00	APBD		-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	6 Unit	143.347.000,00	APBD		5	54.697.781
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	11 Unit	182.901.000,00	APBD		20	114.828.228
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persen	946.432.856,88			100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	946.432.856,88	APBD		12	150.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persen	370.140.000,00			100%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Batam	1 Unit	39.880.000,00	APBD		1	39.880.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	6 Unit	279.910.000,00	APBD		12	279.910.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	72 Unit	50.350.000,00	APBD		72	50.350.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi		100 Persen	53.636.000,00			100	100.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Fasilitasi Izin TDG yang diterbitkan		100	21.654.000,00			100	25.000.000
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Batam	10 Dokumen	21.654.000,00	APBD		10	25.000.000
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		100 Persen	10.328.000,00			100	50.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Batam	8700 Dokumen	10.328.000,00	APBD		9000 Dokumen	50.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting		
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Izin Usaha Perdagangan Mikol yang difasilitasi		100 Persen	21.654.000,00			100	25.000.000
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Batam	10 Dokumen	21.654.000,00	APBD		10	25.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya		21.15 Persen	642.138.898,00			38,46%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi		30.00 Persen	499.955.898,00			40,00%	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Batam	7 Unit	499.955.898,00	APBD		7	700.000.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengelola Pasar yang dilakukan Pembinaan		17.78 Persen	142.183.000,00			40,00%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Batam	1 Dokumen	142.183.000,00	APBD		1	350.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		76,67 Persen	3.445.383.305,00			78,33%	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		83,33 Persen	3.445.383.305,00			91,67%	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Batam	2 Laporan	3.445.383.305,00	APBD		2	6.250.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor		1100 USD (Juta)	310.240.200,00			1.200	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha berorientasi ekspor yang di Promosikan		100 Persen	310.240.200,00			100	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Batam	20 Pelaku Usaha	310.240.200,00	APBD		25	400.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur		91.00 Persen	151.743.900,00			92,00%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Percentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI		91.00 Persen	151.743.900,00			92,00%	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Batam	100 Orang	151.743.900,00	APBD		50	70.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Percentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan		4,76 Persen	80.074.400,00			14,29%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Percentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Promosi dan Pemasaran		100 Persen	80.074.400,00			100%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Batam	5 UMKM	80.074.400,00	APBD		10	150.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.377.083.050,00				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Percentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah		58,00 Persen	3.327.083.050,00			61	3.420.000.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja IKM		65.00 Persen	3.327.083.050,00			70	3.420.000.000
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Batam	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		1	200.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Batam	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD		1	600.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Batam	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD/ DBH- CHT		1	60.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Batam	1 Dokumen	2.627.083.050,00	APBD		1	2.500.000.000
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Batam	2 Dokumen	50.000.000,00	APBD		2	60.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini		40.00 Persen	50.000.000,00			45	60.000.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri dalam Pelaporan pada SIINas		40,00 Persen	50.000.000,00			45	60.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target/ Satuan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting		
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Batam	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1	60.000.000
	UPTD METROLOGI LEGAL				496.234.000,00				
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				496.234.000,00				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				496.234.000,00				
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase Tertib Ukur		91,00 Persen	496.234.000,00			92,00%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Percentase Pelayanan Tera, Tera Ulang		100.00 Persen	496.234.000,00			100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Batam	10000 Unit	496.234.000,00	APBD		11.000	800.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-2 (dua) dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan mengusulkan 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 21.199.932.628,73 usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7					NASIONAL	DAERAH			16	17		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							26.199.932.628,73							25.793.268.980,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							26.199.932.628,73							25.793.268.980,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							22.822.849.578,73							23.193.268.980,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							18.139.632.875,73						-	12.834.674.475,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 Persen	10.964.800,00			-	-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.373.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-			100 % 100 Persen	15.593.578.018,85			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			10.703.409.078,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																10.603.409.078,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	15.492.498.018,85	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-				10.603.409.078,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	101.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen 100 %	408.174.200,00			-	-	-	-	-	350.762.645,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.803.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	3.496.880,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	144.178.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	126.765.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.928.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	11.013.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.038.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	22.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	7.881.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	7.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	188.344.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	180.187.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 % 100 Persen	810.343.000,00			-	-	-	-	-	158.015.812,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	484.095.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					6 Unit	143.347.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			54.697.781,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					11 Unit	182.901.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			103.318.031,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-			100 %	946.432.856,88			-	-	-			1.314.386.940,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															1.314.386.940,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	946.432.856,88	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-					
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	-			100 %	370.140.000,00			-	-	-			258.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															39.780.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	39.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-					
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															168.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	279.910.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-					
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															49.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						50.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				150.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	53.636.000,00									50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang															
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				10 Dokumen	21.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-			-	21.654.000,00			-	-	Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C															
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	21.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Percentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-			100 Persen	10.328.000,00			-	-	Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA															
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				9500 Dokumen	10.328.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						642.138.898,00								1.100.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara Percentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi	-			100 Persen 30.00 Persen	499.955.898,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				7 Unit	499.955.898,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan Percentase Pengelola Pasar yang dilakukan Pembinaan	-			2 Kali/Kegiatan 17.78 Persen	142.183.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	142.183.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						3.445.383.305,00						-	8.708.594.505,00		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Percentase Jumlah barang dan harga yang disurvei Percentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-			100 Persen 91.67 Persen	3.445.383.305,00			-	-	-	-	8.708.594.505,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	3.445.383.305,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.708.594.505,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						310.240.200,00						-	150.000.000,00		
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelaku Usaha berorientasi ekspor yang di Promosikan	-			100 Persen	310.240.200,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal															
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	310.240.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						151.743.900,00						-	100.000.000,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Percentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI	-			91.00 Persen	151.743.900,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal															
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	151.743.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						80.074.400,00						-	150.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	80.074.400,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					-	80.074.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						3.377.083.050,00							2.600.000.000,00					
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						3.327.083.050,00							2.550.000.000,00					
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan Persentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja IKM	-			70.00 Persen 60.00 Persen	3.327.083.050,00			-	-	-	-	2.550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	2.627.083.050,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				5 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD METROLOGI LEGAL						496.234.000,00							1.000.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						496.234.000,00							1.000.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						496.234.000,00							1.000.000.000,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						496.234.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Percentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Percentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI	-			95.00 Persen undefined undefined	496.234.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					23000 Unit	496.234.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
		J U M L A H						26.696.166.628,73							26.793.268.980,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

5.1 Catatan Penting

Renja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 –2029

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 9 Program, 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam, maka seluruh aparatur *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* Kota Batam dalam pelayanan lingkup Perindustrian dan Perdagangan.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD